POLA KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Udi Rosadi[1]

ABSTRACT

The concept of development is a process of society change have different interpretations depending on the perspective of seeing the phenomenon of knowledge in society itself. Communication patterns that are used to refer to the development model being used, ranging from the development model that uses the framework of modernization and criticism on the modernization, to the global development model with the global goals such as MDG's and the target achievement according to the information society Information society summit agreements. This paper will describe a model of public policy and development, and communication patterns within the context of public policy and practical perspective on the development of communication in Indonesia.

Key words: *development, society change, modernization, public policy*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan Publik (Inggris:Public Policy) adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebuah kebijakan publik seharusnya merepresentasikan aspirasi masyarakat dan kemudian dijalankan oleh lembaga yang memiliki tugas pokok dan kewenangan kebijakan tersebut.

Dwijowijoto (2003) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah *mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan)* dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan), maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai "tempat tujuan" tersebut. Dengan kondisi ini maka kebijakan publik dapat dianggap sebagai "manajemen pencapaian tujuan nasional" (Gambar 1).

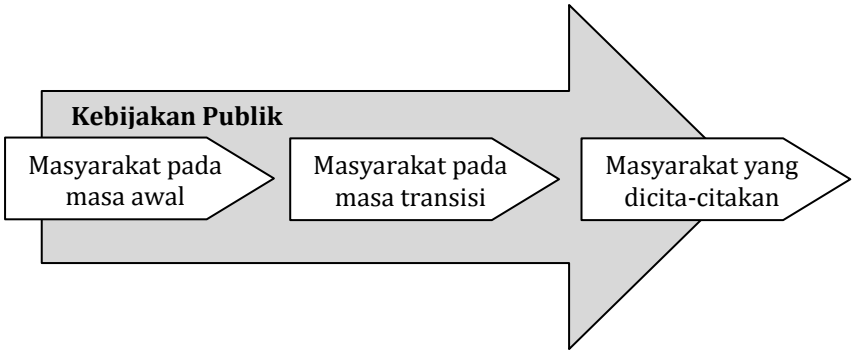

Gambar 1 Kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional

[1] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Kebijakan publik yang pada intinya merupakan kebijakan untuk mengubah suatu kondisi masyarakat menuju ke kondisi masyarakat yang dicita-citakan atau lebih baik dari kondisi sebelumnya hanya dapat tercapai apabila kebijakan tersebut diimplementasikan. Implementasi kebijakan publik dengan demikian dapat disebut sebagai pembangunan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Inayatullah (1967) dalam Nasution (2004) mengenai pembangunan. Inayatullah mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih besar terhadap diri mereka sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik memiliki keterkaitan dengan pembangunan. Namun demikian keterkaitan antara kebijakan publik dan pembangunan ini hingga saat ini belum banyak dipahami oleh masyarakat sebagai sasaran akhir dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, maka perlu dipahami dengan baik berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan publik dan pembangunan.

Pencapaian tujuan pembangunan nasional yang dituangkan dalam berbagai kebijakan publik pada dasarnya akan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan apabila seluruh komponen pembangunan, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat, memahami dengan baik kebijakan publik dan pembangunan yang akan dilaksanakan. Pencapaian pemahaman bersama (mutual understanding) antara komponen pembangunan mengenai kebijakan publik dan pembangunan dapat terjadi apabila terjadi komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan masyarakat. Mengingat masyarakat sebagai sasaran kebijakan publik dan pembangunan di Indonesia jumlahnya sangat banyak dan tersebar di berbagai pulau, maka perlu dirumuskan pola komunikasi seperti apa yang sangat tepat untuk dilaksanakan untuk mencapai pemahaman bersama tersebut.

Tujuan

Tujuan makalah ini adalah untuk:

1. Menjelaskan model kebijakan publik
2. Menjelaskan model pembangunan
3. Menganalisis pola komunikasi kebijakan publik dalam mendorong pembangunan berkelanjutan

MODEL KEBIJAKAN PUBLIK

Jenis Kebijakan Publik

Dwijowijoto (2003) membagi jenis kebijakan publik berdasarkan tiga kriteria, yaitu: makna kebijakan publik, bentuk kebijakan publik dan karakter kebijakan publik.

Makna Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau

dibiarkan. Bentuk kebijakan publik "memilih dan tidak memilih" ini dapat dipahami dalam matrik yang tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2 Kebijakan publik memilih dan tidak memilih

	Kegiatan Strategis	Kegiatan Tidak/Kurang Strategis
Masyarakat mampu melaksanakan	I Pemerintah (dengan masyarakat)	II Masyarakat
Masyarakat tidak mampu melaksanakan	III Pemerintah	IV Pemerintah (dibiarkan)

Sumber: Dwijowijoto (2003)

Berdasarkan Tabel 2 terlihat dengan jelas bahwa pemerintah hanya mengerjakan seluruh pekerjaan pada kuadran II dan sebagian pada kuadran I. Contoh pekerjaan pada masing-masing kuadran adalah sebagai berikut: Kuadran I adalah pendidikan dan transportasi, Kuadran II adalah perdagangan, Kuadran III adalah persenjataan dan bendungan, serta Kuadran IV adalah perintisan dan catatan sipil.

Bentuk Kebijakan Publik

Berdasarkan bentuknya, kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi.

Karakter Kebijakan Publik

Karakter dari kebijakan publik pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan publik tertulis formal. Kebijakan publik berdasarkan karakternya ini dibagai menjadi dua, yaitu regulasi versus deregulatif atau restriktif versus non-restriktif dan alokasi versus distribusi.

Kebijakan regulasi versus deregulatif adalah kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan. Sebagian besar kebijakan publik berkenaan dengan hal-hal yang regulatif dan deregulatif. Sedangkan kebijakan restriktif versus distribusi biasanya berupa kebijakan-kebijakan yanag berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.

Model Analisis Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1978) dalam Wahab (2008) membagi model analisis kebijakan publik dalam enam buah model, yaitu: Model Kelembagaan, Model Kelompok, Model Elit, Model Rasional, Model Inkremental dan Model Sistem.

Model Kelembagaan

Model kelembagaan pada dasarnya merupakan sebuah model analisis yang dikembangkan oleh para pakar ilmu politik yang memandang kebijakan publik

sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Struktur-struktur dan lembaga-lembaga pemerintahan sejak lama memang menjadi pusat perhatian ilmu politik, bahkan ilmu politik sering disebut sebagai suatu ilmu yang mempelajari lembaga-lembaga pemerintah (government institusional).

Model Kelompok

Model kelompok pada dasarnya berangkat dari suatu anggapan bahwa interaksi antar kelompok dalam masyarakat itulah yang menjadi pusat perhatian politik. Dalam hal ini individu-individu yang memiliki latar belakang kepentingan yang sama biasanya akan bergabung baik secara formal maupun secara informal untuk mendesakkan kepentingan-kepentingan mereka kepada pemerintah. Dengan demikian dalam model ini kebijakan publik dipandang sebagai hasil keseimbangan kelompok.

Model Elit

Model elit adalah sebuah model analisis yang dikembangkan dengan mengacu pada teori elit. Teori elit pada umumnya menentang keras terhadap pandangan yang mengatakan bahwa kekuasaan dalam masyarakat itu terdistribusi secara merata. Dengan mengacu pada hasil karya para teoritisi elit klasik, C. Wirght Mills (1956) dalam Wahab (2008) mengungkapkan adanya suatu gejala konsentrasi kekuasaan politik di tangan sekelompok kecil warga masyarakat. Dalam model elit ini, kebijakan publik dipandang sebagai Preferensi Elit.

Model Rasional

Model pembuatan kebijakan publik rasional barangkali akar-akar pemikirannya dapat dilacak pada karya Herbert Simon yang berjudul Adminstration Behaviour. Sesuai dengan karya ini maka dalam model rasional, kebijakan publik pada dasarnya dapat dianggap sebagai pencapain tujuan secara efisien.

Model Inkremental

Model inkremental pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Charles E. Lindblom sebagai kritik terhadap model rasional komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan demikian dalam model ini kebijakan publik dapat dipandang sebagai perubahan kecil-kecilan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya.

Model Sistem

Model sistem pada awalnya adalah sebuah model yang dikembangkan oleh para ahli biologi. Model ini kemudian diterapkan pada studi politik atau studi kebijakan publik oleh ilmuwan politik Amerika David Easton. Easton berpendapat bahwa kegiatan politik itu dapat dianalisis dari sudut pandang sistem, terdiri dari jumlah proses-proses yang harus tetap dalam keadaan seimbang kalau kegiatan politik itu ingin tetap terjaga kelestariannya. Dalam model ini, kebijakan publik dipandang sebagai output dari sistem.

MODEL PEMBANGUNAN

Perkembangan Makna dan Model Pembangunan

Seiring dengan perkembangan jaman, makna pembangunan telah mengalami berbagai pergeseran. Menurut Kuncoro (2004) dalam Badruddin (2009), pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak negara berkembang mulai menyadari bahwa "pertumbuhan ekonomi" (economic growth) tidak identik dengan "pembangunan ekonomi" (economic development). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka, memang dapat dicapai namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural (Sjahrir 1986). Ini pula agaknya yang memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (necessary) tetapi tidak mencukupi (sufficient) bagi proses pembangunan (Esmara 1986, Meier 1989 dalam Kuncoro 2004). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan di banyak negara, setidaknya pada tahap awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan sumber daya manusia (SDM) dalam strategi semacam ini hanyalah sebagai "instrumen" atau salah satu "faktor produksi" saja. Manusia ditempatkan sebagai posisi instrumen dan bukan merupakan subyek dari pembangunan. Titik berat pada nilai produksi dan produktivitas telah mereduksi manusia sebagai penghambat maksimisasi kepuasan maupun maksimisasi keuntungan (Badruddin 2009).

Berdasarkan berbagai pemikiran atau makna pembangunan yang dikemukakan oleh berbagai pakar, makna pembangunan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat model pembangunan yang dominan berdasarkan masing-masing paradigma yang mendasarinya. Empat model pembangunan tersebut secara riil memfokuskan atau memandang pembangunan dengan mengacu pada kriteria tertentu yaitu pertumbuhan ekonomi, teknologi padat modal, perencanaan terpusat dan penyebab keterbelakangan (Tabel 2).

Tabel 2 Model pembangunan

Model Dominan	Paradigma Alternatif
Pertumbuhan ekonomi	keseimbangan atau kesetaraan distribusi dan kualitas hidup
Teknologi padat modal	menekankan pada teknogi yang padat karya. proses pembangunan menekankan pada integrasi cara tradisional dan modern
Perencanaan terpusat	perencanaan lebih mengadalkan pada pengembanagan diri melalui proses desentralisasi dan partisipasi masyarakat
Penyebab keterbelakangan berasal dari faktor dalam	faktor dari internal tetapi juga fakor ekternal

Sumber: Schramm (1976)

Pembangunan Global

Giddens (1990) dalam Sztompka (2008) menyatakan bahwa modernisasi telah menimbulkan suatu perubahan menuju globalisasi dalam arti berkembangnya hubungan sosial, ekonomi, politik dan kultural ke seluruh dunia. Akibatnya mengurangi peran negara sehingga terlalu kecil untuk dapat menanggulangi masalah besar kehidupan dan terlalu besar untuk menanggulangi masalah besar kehidupan.

Globalisasi diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal (Robertson 1992) dalam Sztompka (2008). Masyarakat dunia saling tergantung di semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi dan kultural. Cakupan saling ketergantungan tersebut secara nyata mengglobal seperti apa yang dikatakan oleh Chirot (1977), yaitu "Tak ada satu negara pun di dunia yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri."

Hubungan saling ketergantungan antar berbagai bangsa di dunia tersebut ternyata telah menimbulkan perubahan sosial yang luar biasa di masyarakat. Kemanusiaan tak lagi sekadar kumpulan statistik atau sebuah kategori filosofi atau ideologis. Kemanusiaan sudah berubah menjadi kesatuan sosiologis nyata, meliputi semua orang yang hidup di dunia. Kini orang dapat berbicara mengenai struktur global hubungan politik, ekonomi, dan kultural yang berkembang melampaui batas tradisional dan mengingat satuan masyarakat yang sebelumnya terpisah ke dalam satu sistem, yaitu sistem global. Kecenderungan ini baru saja terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Peter Worsley (1984), yaitu "Sebelum dekade 1980-an, masyarakat global belum terwujud."

Terwujudnya masyarakat global seperti telah terjadi saat ini memungkinkan terjadinya pembangunan global. Dalam pembangunan global ini, masyarakat dunia dituntut untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang bersifat global. Untuk itu, maka negara-negara di dunia membentuk berbagai kesepakatan sebagai sasaran bersama dalam menjalankan pembangunan.

Menurut Haryono Suyono, pembangunan nasional di banyak negara sekarang ini perlu dirombak pendekatannya dengan menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Seruan perombakan pendekatan pembangunan itu muncul ketika para pemimpin dunia menyadari dan bersama-sama mencanangkan komitmen untuk mengentaskan kemiskinan. Tidak kurang dari 189 pemimpin dunia pada sidang PBB di New York pada tahun 2000 sepakat untuk menerima prioritas pembangunan dalam lima belas tahun ke depan menganut sasaran dan target *Millennium Development Goals* (MDGs). Target ini menganut delapan sasaran utama yang perlu dipahami secara luas.

Delapan sasaran dan target MDGs sebagai kesepakatan masyarakat global dalam melaksanakan pembangunan global tersebut secara detil adalah sebagai berikut:

- Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim
- Pemerataan pendidikan dasar
- Mendukung adanya persaman jender dan pemberdayaan perempuan
- Mengurangi tingkat kematian anak
- Meningkatkan kesehatan ibu
- Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya
- Menjamin daya dukung lingkungan hidup
- Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Selain MDGs, sasaran dan target pembangunan global yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan pembangunan adalah sasaran masyarakat informasi 2015 - 2019. Sasaran masyarakat informasi 2015 - 2019 sebagai kesepakatan dalam pembangunan global diantaranya adalah sebagai berikut:

- Hubungkan semua desa ke Internet dan membangun titik akses masyarakat
- Tercapainya pemanfaatan dan akses internet oleh 50 persen atau separuh penduduk dunia
- Hubungkan ilmiah dan institusi penelitian
- Seluruh lembaga pemerintahan terhubung dengan internet
- Semua rumah sakit terhubung dalam jaringan.

POLA KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Model Komunikasi Pembangunan

Kebijakan publik seringkali tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi dari kebijakan publik tersebut (pembangunan) seringkali dikomunikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan pembangunan. Kegiatan mengkomunikasikan pembangunan oleh pemerintah ini disebut sebagai komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan pada saat ini telah berkembang dengan berbagai model dengan berbagai pendekatan, diantaranya adalah (1) pendekatan skala luas dengan penggunaan media massa . Model ini dibatasi khusus oleh variabel ekonomi; (2) Pendekatan yang mempromosikan komunikasi akar rumput atau komunitas; dan (3) Model baru yang menekankan pada dimensi luas dari pembangunan yang memungkinkan mendefinisikan sebagai proses global.

Model komunikasi pembangunan dapat dilihat dari tiga bentuk yang berbeda. Tiga model komunikasi pembangunan tersebut adalah (1) *development communication* yang dikemukakan oleh Lerner, Pye dan Schramm; (2) *development support communication* yang dikemukakan oleh UNDP; dan (3) *development as discourse practice*. Tiga model komunikasi pembangunan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.

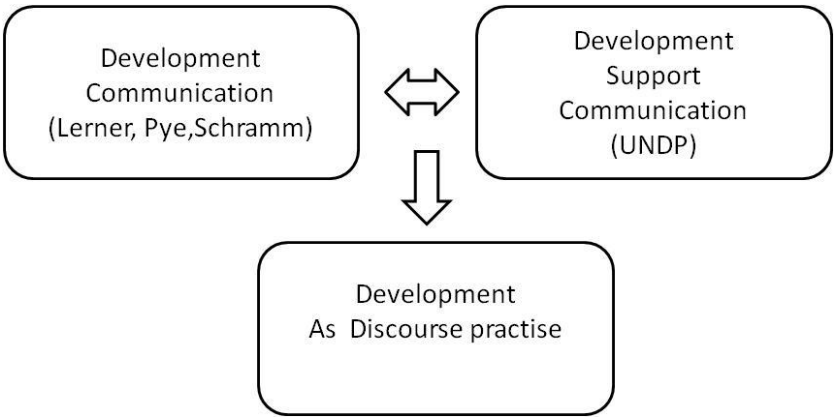

Gambar 2 Model komunikasi pembangunan

Pola Komunikasi Kebijakan Publik dan Pembangunan

Memasuki era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat luar biasa sehingga aliran data dan informasi dari seluruh penjuru dunia menjadi sangat mudah aksesibilitasnya. Kemudahan tersebut didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menembus batas ruang dan waktu. Kemajuan peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad informasi ini telah memudahkan manusia berkomunikasi antara satu dengan lainnya.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia secara nyata dapat dilihat dari pencapaian pembangunan sektor informasi dan komunikasi tahun 2004 – 2009, yaitu:

- Penurunan tarif seluler hingga 90% dari US$ 0,15/min tahun 2005 (termahal di Asia) menjadi US$ 0,015/min tahun 2008 (termurah di Asia)
- Fasilitasi pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) telekomunikasi nasional serat optik Palapa Ring di wilayah timur Indonesia
- *Launching* TV digital *free to air* dan *mobile* di Jabodetabek
- Pembangunan pemancar RRI di 138 kab/kota dan pemancar TVRI di 25 lokasi *blank spot* dan perbatasan
- Pembangunan dua *ICT Training Center* untuk mendukung peningkatan e-literasi
- Penyelesaian proyek percontohan *e-government.*

Pencapaian pembangunan sektor informasi dan komunikasi tahun 2004 – 2009 seperti tersebut di atas pada dasarnya mengindikasikan bahwa teknologi informasi merupakan suatu media yang berpotensi tinggi untuk dimanfaatkan dalam mengkomunikasikan kebijakan publik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam upaya untuk mewujudkan target dan sasaran global (MDGs dan Masyarakat Informasi), maka beberapa pola komunikasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pada tataran global melalui jaringan berbasis teknologi komunikasi dan informasi mengembangkan transaksi global.
- Pola komunikasi melalui TIK berubah dari masif satu dimensi menjadi masif multi dimensi (mass customize).
- Sasaran global sebagai cara pencapaiannya harus disesuaikan dengan kontek lokal.
- Pemanfaatan potensi global dengan menyelenggarakan kemitraan dan jaringan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung komunikasi kebijakan publik dan pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya tidak serta merta mudah untuk dilaksanakan. Hal ini terjadi karena Indonesia terlebih dahulu perlu menyiapkan segala kesiapan teknologi yang dibutuhkan. Dari sisi ketersediaan infrastruktur, Indonesia sebanding dengan negara ASEAN lainnya dalam penyediaan layanan seluler, namun jauh tertinggal dalam pengembangan infrastruktur masa depan, yaitu internet dan *broadband*. Dari sisi pemanfaatan, Indonesia jauh tertinggal yang disebabkan oleh terbatasnya akses, rendahnya tingkat *e-literasi*, serta belum efektifnya implementasi regulasi termasuk strategi pembiayaan (Tabel 3).

Tabel 3 Daya saing kesiapan teknologi Indonesiaa di ASEAN, 2008 - 2009

Negara	Peringkat Kesiapan Teknologi 2008-2009 (Sumber: *Global Competitiveness Report 2008-2009, World Economic Forum*)									
	Daya Saing	**Daya Saing Teknologi**	**Tekno-logi Maju**	**Daya Serap Teknologi**	**Regulasi TIK**	**FDI dan Transfer Teknologi**	**Jasa Seluler**	**Pengguna Internet**	**Jumlah Komputer**	***Broad-band***
Thailand	34	66	50	61	61	48	72	78	72	94
Indonesia	**55**	**88**	**61**	**65**	**71**	**24**	**100**	**107**	**105**	**100**
Vietnam	70	79	71	54	72	57	114	70	63	79
Philipina	71	70	52	49	60	50	84	101	70	96
Sri Lanka	77	82	54	45	59	47	102	117	94	98
Kamboja	109	123	109	106	122	94	120	130	128	108

KESIMPULAN

Kebijakan publik memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pembangunan. Komunikasi kebijakan publik dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia yang berkelanjutan dapat diterapkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam mendukung pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam mengkomunikasikan kebijakan publik dan pembangunan nasional, bangsa Indonesia perlu meningkatkan daya saing teknologi secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Badruddin S. 2009. Pengertian Pembangunan. http://profsyamsiah. wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/ [13 Oktober 2009].

Dwijowijoto RN. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nasution Z. 2004. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suyono H. Memaknai Indikator MDGs, Pengentasan Kemiskinan. http://www.haryono.com/article/article/memaknai-indikator-mdgs-pengentasan-kemiskinan.html

Sztompka P. 2008. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Cetakan ke-4. Jakarta: Prenada Media Group.

Wahab SA. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadyah Malang.